



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAPORAN PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini tersusun atas Kerjasama tim di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam rangka percepatan penerapan dan pencapaian SPM untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam penyajian laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Atas bantuan dan kerjasamanya dari berbagai pihak kami mengucapkan terima kasih banyak.

Painan, 16 Januari 2025

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan**



**Agustina Rahmadani, S.ST.M.M
NIP.19790810 200312 2 006**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. KEBIJAKAN UMUM.....	3
D. ARAH KEBIJAKAN	3
BAB II PENERAPAN SPM	5
A. Pengumpulan Data	5
B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar	7
C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	1 5
D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	1 8
BAB III PENCAPAIAN SPM	1 9
A. Jenis Pelayanan Dasar	1 9
B. Target Pencapaian SPM	2 5
C. Alokasi Anggaran.....	2 6
D. Dukungan Personil.....	2 7
E. Hasil Capaian	3 2
F. Permasalahan dan Solusi.....	3 3
F.2 Solusi	3 3
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	3 4
BAB V PENUTUP	3 5
A. Kesimpulan	3 5
B. Saran	3 5

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Penduduk Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir 2024.....	6
Tabel 2. 2 Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Kegiatan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2024.....	7
Tabel 2. 3 Penghitungan Kebutuhan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat, Vaksin, Dan Perlengkapan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024.....	8
Tabel 2. 4 Penghitungan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024.....	12
Tabel 2. 5 Penyusunan Rencana Pemenuhan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.....	15
Tabel 2. 6 Penyusunan Rencana Pemenuhan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.....	16
Tabel 2. 7 Capaian Pelaksanaan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024.....	18
Tabel 3. 1 Capaian Pelaksanaan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024.....	25
Tabel 3. 2 Alokasi Anggaran SPM Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	26
Tabel 3. 3 Rekapitulasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024.....	27
Tabel 3. 4 Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024.....	32
Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2024.....	34

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan Pemerintahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervise, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam konstektual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstural memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggung

jawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dan konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mencapai pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

C. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesabilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan public dan sebagai instrument bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik salah satunya bidang Kesehatan.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Menyusun rencana Pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman,

pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrument kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB II

PENERAPAN SPM

A. Pengumpulan Data

Berdasarkan Permendagri No.59 Tahun 2021 ada 12 jenis layanan untuk SPM

Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Tabel 2. 8 Rekapitulasi Penduduk Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024

TARGET PENERIMA PELAYANAN														
NO	KECAMATAN	Puskesmas	PELAYANAN KESEHATAN											
			IBU HAMIL	IBU BERSALIN	BAYI BARU LAHIR	BALITA	PADA USIA DASAR	PADA USIA PRODUKTIF	PADA USIA LAJUT	HIPTENSI	PENDERITA DIABETES MELITUS	ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (DDG) BERAT	ORANG TERDUGA TUBER KULOSIS	ORANG DENGAN RISIKO TERPERKSI HIV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Belantai Tarusan	30	30	28	130	214	288	123	57	205	61	7	9
	Bayang	Pasar Baru Koto Perapak	38	38	36	167	275	462	171	71	140	76	29	14
			31	30	29	134	221	354	112	87	115	60	16	14
	Bayang Utara	Asam Kumbang	24	24	22	103	170	350	119	85	183	39	10	10
			10	10	10	45	74	204	212	27	57	19	6	4
	IV Jurai	Salido Lumpo	50	49	47	218	359	557	133	165	691	34	13	23
			15	15	14	66	109	267	362	17	64	92	12	7
		RSUD M. Zein											61	
		RSU BKM											20	
	Batang kapus	Pasar Kuok IV Koto Mandik	28	28	26	121	200	433	242	51	162	56	16	14
			19	19	18	84	138	238	303	43	109	48	8	9
	Sutera	Suranti Kayu Gadang	20	20	45	212	349	297	143	105	59	87	14	17
			48	48	19	88	145	608	283	79	110	45	8	14
	Lengayang	Kambang Koto Baru	52	51	49	227	374	558	117	79	328	67	9	34
			24	24	23	107	176	643	162	120	141	40	9	10
	Ranah Pesisir	Balai Selasa	41	41	39	181	298	218	112	147	484	65	22	24
	Baganti	Airhaji	62	61	58	271	447	186	291	35	304	43	47	50
	Airpura	Airpura	23	23	21	99	164	297	179	53	117	48	15	17
	Pancung Soal	Inderapura	36	36	34	159	262	522	88	95	183	55	8	20
	tapan	Ranah Ampuk Hulu	20	20	19	89	147	209	60	38	101	40	34	12
	Basa IV Balai	Tapan	19	19	18	84	138	438	138	55	290	29	26	10
		RSUD Tapan	0	0			0						3	
	Lunang	Tanjung Bernein	29	29	27	128	211	874	223	137	465	34	19	18
	Silaut	Tanjung Makmur	22	21	20	92	152	407	173	81	121	26	8	15
		Jumlah	641	636	602	2805	4622	8.410	3743	1.627	4.429	1.064	420	345

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

a. Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Kegiatan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2024

Tabel 2. 9 Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Kegiatan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Sumber Dana
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	716.900.803	678.442.700	94,64%	DAU + DAK Non Fisik
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	36.095.540	302.109.050	83,70%	DAU + DAK Non Fisik
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	33.622.612	27.738.800	82,50%	DAU
4	Pelayanan Kesehatan Balita	275.590.050	247.731.700	89,89%	DAU + DAK Non Fisik
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	942.111.500	865.998.000	91,92%	DAU + DAK Non Fisik
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	212.958.970	169.345.042	79,52%	DAU + DAK Non Fisik
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	12.020.802	8.373.600	69,66%	DAU
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	88.605.730	78.320.000	88,39%	DAU
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	581.360.749	531.116.200	91,36%	DAU + DAK Non Fisik
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	82.396.418	74.307.228	90,18%	DAU
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	139.701.643	102.698.750	73,51%	DAU + DAK Non Fisik
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	48.580.000	27.480.000	56,57%	DAU

b. Penghitungan Kebutuhan Barang / Alat untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten

Tabel 2. 10 Penghitungan Kebutuhan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat, Vaksin, Dan Perlengkapan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024

NO	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td) 2. Tablet tambah darah 3. Test Kehamilan 4. Tes HB 5. Tes Gol. Darah 6. Tes Glukoprotein 7. Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu 8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	63 115.380 641 641 641 641 641 641	63 115.380 641 641 641 641 641 641	- - - - - - - -	16.995 372 1.880 5.080 15.000 4.931 1.200 45.000	1.070.685 42.921.360 1.205.080 3.256.280 9.615.000 3.160.771 769.200 28.845.000	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Formulir Partograf 2. Kartu Ibu (Rekam Medis) 3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	636 636 636	636 636 636	- - -	500 1.200 45.000	318.000 763.200 28.620.000	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Vaksin Hepatitis BO 2. Vitamin K1 Injeksi 3. Salep/ Tetes Mata Antibiotik 4. Formulir Bayi Baru Lahir 5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) 6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	602 602 602 602 602 602	602 602 602 602 602 602	- - - - - -	78.991 3.589 2.007 500 1.000 45.000	47.552.582 2.160.578 1.208.214 301.000 602.000 27.090.000	

4	Pelayanan Kesehatan Balita	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku 2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) 3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 4. Vitamin A Biru 5. Vitamin A Merah 6. Vaksin Imunisasi Lanjutan: DPT-HB -Hib, Campak, Rubella 7. Vaksin Imunisasi Dasar : HB0, BCG, Polio, IPV, DPT-HB -Hib-Campak-Rubella 8. Jarum Suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) 9. Peralatan Anatitik	2.805	2.805	-	2.000	5.610.000	
			2.805	2.805	-	250		
			2.805	2.805	-	45.000	126.225.000	
			1.130	1.130	-	668	754.840	
			2.805	2.805	-	1.118	3.135.990	
			2.805	2.805	-	7.899	22.156.695	
			2.805	2.805	-	259.798	728.733.390	
			2.805	2.805	-	-	-	
			2.805	2.805	-	-	-	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1. Buku Raport Kesehatanku 2. Buku Pemantauan Kesehatan 3. Kuisioner Skrining Kesehatan 4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di dalam sekolah 5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di dalam sekolah	4.622	4.018	-	42.000	168.756.000	
			4.622	4.018	-	44.000	176.792.000	
			4.622	4.018	-	1.500	6.027.000	
			4.622	4.018	-	1.000	4.018.000	
			4.622	4.018	-	1.000	4.018.000	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. Pedoman dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 2. Alat Ukur Berat Badan, Alat Ukur Tinggi Badan, Alat Ukur Lingkar Perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes 3. Formulir Pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem Informasi Penyakit tidak menular (SIP TM)	21	21	-	-	-	
			21	21	-	1.150.000	24.150.000	
			21	21	-	-	-	

7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1. Strip uji pemeriksaan gula darah, 2. Strip uji pemeriksaan Kolesterol 2. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (Skilas), Instrumen aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ Activity Daily Living (ADL Barthel) 3. Buku kesehatan lansia	21	21	-	65.000	1.365.000	
			3.743	3.080	-	69.000	212.520.000	
			3.743	3.080	-	3.000	9.240.000	
			21	21	-	50.000	1.050.000	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan Media Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) 2. Tensimeter 3. Formulir Pencatatan dan pelaporan aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	21	21	-	-	-	
			42	42	-	80.000	3.360.000	
			2	2	-	-	-	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. Glukometer, Strip uji pemeriksaan Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet 2. Formulir Pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem Informasi penyakit tidak menular (SIP TM), ASIK (SehatIndonesiaku), SIMPLUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) 3. Media Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE)	21	21	-	42.900	900.900	
			2	2	-	-	-	
			21	21	-	-	-	

c. Penghitungan Kebutuhan SDM Kesehatan untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah

Tabel 2. 11 Penghitungan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Dokter/Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	52	52	0	
		2. perawat	292	292	0	
		3. Bidan	431	431	0	
		4. Tenaga Kefarmasian	24	24	0	
		5. Tenaga Gizi	19	19	0	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Dokter/Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	52	52	0	
		2. Bidan	431	431	0	
		3. Perawat	292	292	0	
		4. Tenaga Kefarmasian	24	24	0	
		5. Tenaga Gizi	19	19	0	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Dokter/Dokter Spesialis Anak	54	54	0	
		2. Bidan	431	431	0	
		3. Perawat	292	292	0	
		4. Tenaga Kefarmasian	24	24	0	
		5. Tenaga Promosi Kesehatan	42	42	0	
		6. Tenaga Gizi	19	19	0	
		7. Kader Kesehatan	42	42	0	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1. Dokter	52	52	0	
		2. Bidan	431	431	0	
		3. perawat	192	192	0	
		4. Tenaga Gizi	19	19	0	
		5. guru Paud	42	42	0	
		6. Kader Kesehatan	42	42	0	

4	Pelayanan Kesehatan Balita	1. Dokter	52	52	0	
		2. Bidan	431	431	0	
		3. perawat	192	192	0	
		4. Tenaga Gizi	19	19	0	
		5. guru Paud	42	42	0	
		6. Kader Kesehatan	42	42	0	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendiidikan Dasar	1. Dokter/Dokter Gigi	77	77	0	
		2. Bidan	431	431	0	
		3. perawat	292	292	0	
		4. Tenaga Gizi	19	19	0	
		5. Tenaga Kefarmasian	24	24	0	
		6. Tenaga Kesehatan Masyarakat	27	27	0	
		7. Guru	42	42	0	
		8. Kader Kesehatan Terlatih	42	42	0	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1. Dokter	77	77	0	
		2. Bidan	431	431	0	
		3. perawat	292	292	0	
		4. Tenaga Gizi	19	19	0	
		5. Tenaga kesehatan Masyarakat	27	27	0	
		6. Kader Kesehatan Terlatih	42	42	0	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1. Dokter	77	77	0	
		2. Bidan	431	431	0	
		3. perawat	292	292	0	
		4. Tenaga Gizi	19	19	0	
		5. Tenaga kesehatan Masyarakat	27	27	0	
		6. Kader Kesehatan Terlatih	42	42	0	
8	Hipertensi	1. Dokter	52	52	0	
		2. Bidan	431	431	0	
		3. perawat	292	292	0	
		4. Tenaga Gizi	19	19	0	
		5. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	42	42	0	
		6. Tenaga Kefarmasian	24	24	0	
		7. Tenaga kesehatan Masyarakat	27	27	0	

9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat 4. Tenaga Kefarmasian 5. Tenaga kesehatan Masyarakat 6. Ahli Gizi 7. Tenaga Medis Ahli Teknologi Laboratorium (ATLM)	42 431 292 24 27 19 49	42 431 292 24 27 19 49	0 0 0 0 0 0 0	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1. Dokter 2. Tenaga Kesehatan yang Memiliki kompetensi dan Kewenangan di Bidang Kesehatan Jiwa 3. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa 4. Tenaga Profesional lainnya	21 21 21 21	21 21 21 21	0 0 0 0	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	1. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam /dokter Spesialis Paru 2. Perawat 3. Tenaga Kefarmasian 4. Tenaga kesehatan Masyarakat 5. Analis Teknik Laboratorin medik (ATML) 6. Tenaga Radiografer 7. Kader Kesehatan	24 24 24 24 24 27 24	24 24 24 24 24 27 24	0 0 0 0 0 0 0	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam /dokter Spesialis kulit dan kelamin 2. Bidan 3. Perawat 4. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) 5. Tenaga kesehatan Masyarakat 6. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	24 24 24 24 24 42	24 24 24 24 24 42	0 0 0 0 0 0	

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tabel 2. 12 Penyusunan Rencana Pemenuhan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

URUSAN/BIDANG/URUSAN/PROGRAM *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			TAHUN N+1		TAHUN N+2		TAHUN N+3		TAHUN N+4		TAHUN N+5			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			6	7	8	9	10	11							
3	4	5													12
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar															
Urusan pemerintahan bidang kesehatan															
Pemediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKF rujukan tingkat daerah Kabupaten/kota	k														
Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan			100%	49.206.653.728	100%	55.386.739.188	100%	57.474.739.188	100%	58.700.739.188	100%	60.251.739.188	100%	60.301.739.188	Dinas Kesehatan

Tabel 2. 13 Penyusunan Rencana Pemenuhan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan																
No	KODE)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	UNIT KERJA PERANGKAT
					TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1	1	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
1 02		Urusan Pemerintahan Bidang														
1 02 02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP														
		Rujukan Tingkat Daerah														
1 02 02 2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
1 02 02 2.02 01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	50.000.000	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	4.210.588.000	100%	5.000.000.000	100%	5.300.000.000	100%	5.500.000.000	100%	5.600.000.000	100%	5.600.000.000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	803.042.600	100%	900.000.000	100%	905.000.000	100%	92.000.000	100%	925.000.000	100%	925.000.000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	128.521.300	100%	130.000.000	100%	140.000.000	100%	145.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	128.721.300	100%	200.000.000	100%	205.000.000	100%	230.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000	Dinas Kesehatan

1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	394.067,100	100%	4.000.000,000	100%	450.000,000	100%	500.000,000	100%	550.000,000	100%	550.000,000	Dinas Kesehatan
2	03	03	2.03	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	130.271,300	200%	150.000,000	200%	160.000,000	200%	165.000,000	200%	170.000,000	200%	170.000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan	100%	100.000,000	100%	250.000,000	100%	255.000,000	100%	260.000,000	100%	265.000,000	100%	265.000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	250.000,000	100%	225.000,000	100%	260.000,000	100%	265.000,000	100%	270.000,000	100%	270.000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100%	100.000,000	100%	150.000,000	100%	155.000,000	100%	155.000,000	100%	165.000,000	100%	165.000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga menderita Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	69.085,500	100%	70.000,000	100%	75.000,000	100%	80.000,000	100%	85.000,000	100%	85.000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	55.369,580	100%	70.000,000	100%	75.000,000	100%	80.000,000	100%	85.000,000	100%	85.000,000	Dinas Kesehatan

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tabel 2. 14 Capaian Pelaksanaan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KABUPATEN)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET 3	REALISASI 4	CAPAIAN (%) 5	TARGET 6	REALISASI 7	CAPAIAN (%) 8		
1								9	10
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	641	641	100	641	641	100	97.95	Tuntas Utama
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	636	636	100	636	636	100	97.95	Tuntas Utama
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	602	602	100	601	601	100	97.95	Tuntas Utama
4	Pelayanan Kesehatan Balita	2.805	2.805	100	2.802	2.802	100	97.95	Tuntas Utama
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	4.622	4.018	87	4.622	4.018	87	97.95	Tuntas Utama
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.410	8.410	100	8.410	8.410	100	97.95	Tuntas Utama
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	3.743	3.080	82	3.743	3.080	82	97.95	Tuntas Utama
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.627	1.627	100	1.627	1.627	100	97.95	Tuntas Utama
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.429	4.429	100	4.429	4.429	100	97.95	Tuntas Utama
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.064	1.064	100	1.064	1.064	100	97.95	Tuntas Utama
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	420	420	100	420	420	100	97.95	Tuntas Utama
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melenahkan Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	345	345	100	345	345	100	97.95	Tuntas Utama

BAB III

PENCAPAIAN SPM

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Kabupaten/Kota mencakup 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar, yaitu:

a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan.

Standar pelayanan ibu hamil terdiri dari 2 yaitu standar kualitas dan standar kuantitas. Standar kualitas adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal 4 (empat) kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar kuantitas adalah pelayanan yang meliputi 10 T yaitu: Pengukuran BB, Pengukuran TB, Pengukuran LILA, Pengukuran TFU, Penentuan DJJ, Pemberian Imunisasi, Pemberian Tablet FE, Tes Laboratorium, Tatalaksana kasus dan temu wicara.

b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh minimal 2 orang yaitu: Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas, Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, dan Klinik bersalin. Pustu dan Poskesri dapat dikatakan standar jika pemerintah dapat menjamin ketersediaan alat sesuai standar.

c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir.

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar pelayanan bayi baru lahir meliputi Standar kuantitas, yaitu kunjungan neonatal 1 (KN1) 6-48 Jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari, dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari.

Sedangkan standar kualitas meliputi:

- Pelayanan Neonatal 0-6 jam
 - a. Pemotongan tali pusat
 - b. IMD
 - c. Vit K1
 - d. Pemberian salep mata
 - e. Injeksi HB0
- Pelayanan Neonatal 6 jam-28 hari
 - a. Konseling perawatan BBL dan ASI eksklusif
 - b. MTBM
 - c. Vit K bagi yang belum
 - d. Imunisasi HB0 untuk usia < 24 jam
 - e. Penanganan rujukan bagi kasus neonatal dan komplikasi

d. Pelayanan Kesehatan balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada anak usia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diberikan di fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

Pelayanan Kesehatan meliputi:

- Pelayanan Kesehatan 0-11 bulan
 - a. Penimbangan minimal 8 x setahun
 - b. Pengukuran TB minimal 2 x setahun
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun

- d. Pemberian kapsul Vit A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun
 - e. IDL
 - Pelayanan Kesehatan 12-23 bulan
 - a. Penimbangan minimal 8 x setahun
 - b. Pengukuran TB minimal 2 x setahun
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
 - d. Pemberian kapsul Vit A dalam 2 x setahun
 - e. Pemberian IDL lanjutan
 - Pelayanan Kesehatan balita usia 24-59 bulan
 - a. Penimbangan minimal 8 x setahun
 - b. Pengukuran TB 2 x setahun
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
 - d. Pemberian kapsul Vit A sebanyak 2 x setahun
 - Pemantauan perkembangan balita
 - Pemantauan kapsul Vit A
 - IDL
 - Imunisasi lanjutan
 - Pengukuran BB dan TB
 - Edukasi dan informasi
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar.
- Setiap anak pada usia Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjangkaran Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di wilayah Kabupaten/Kota tersebut pada usia 7 s.d 15 Tahun yang dilakukan oleh Puskesmas.
- Standar pelayanan Kesehatan meliputi:
- Pengukuran TB, BB dan lingkaran perut
 - Pemeriksaan TD
 - Pemeriksaan gula darah
 - Anamnesa perilaku beresiko
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
- Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
- Pelayanan skrining Kesehatan usia 15-59 tahun, meliputi:
- Pengukuran TB, BB dan lingkaran perut
 - Pengukuran TD
 - Pemeriksaan gula darah
 - Anamnesa perilaku beresiko

g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining Kesehatan minimal dilakukan sekali setahun. Skrining kesehatan sesuai standar meliputi:

- Pengukuran TB, BB, dan lingkar perut
- Pengukuran TD
- Pemeriksaan gula darah
- Pemeriksaan gangguan mental
- Pemeriksaan gangguan kognitif
- Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- Anamnesa perilaku beresiko

h. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahu ke atas. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan Kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi Kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi tanpa komplikasi (Jantung, Stroke, Diabetes Mellitus dan Gagal ginjal kronis) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk menangani komplikasi.

Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi:

- Pengukuran TD dilakukan minimal 1 kali sebulan di fasyankes
- Edukasi perubahan gaya hidup dan kepatuhan minum obat
- Rujukan bila diperlukan

i. Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus

Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes mellitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotive dan preventif di FKTP. Penduduk yang ditemukan penderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas Kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.

Pelayanan Kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi:

- Pengukuran gula darah
- Edukasi
- Terapi farmakologi

j. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- a. Pelayanan promotive preventif yang bertujuan meningkatkan Kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
- b. Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter puskesmas di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:

- a. Pemeriksaan status mental
- b. Wawancara

k. Pelayanan Kesehatan pada orang dengan TB

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya. Pelayanan Tuberkulosis sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain:

- a) Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat di dukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
- b) Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
- c) Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktivitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan. Kegiatan promotive dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian factor risiko dan pemberian obat pencegahan. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang

dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati sampai sembuh).

Pemeriksaan pelayanan Kesehatan TB sesuai standar meliputi:

- Pemeriksaan anamnesia pertama yaitu dari pemeriksaan fisik sampai ke Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh dokter atau perawat poli di Puskesmas atau dirumah sakit
- Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium menggunakan TCM (Tes Cepat Molekuler) atau menggunakan mikroskopis di Puskesmas dan Rumah sakit
- Pemeriksaan klinis menggunakan rontgent/torax dilakukan di rumah sakit

l. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.

Pelayanan Kesehatan meliputi:

- Pemberian informasi terkait HIV-AIDS
- Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang ditetapkan
- Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya.
- Orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negative harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

B. Target Pencapaian SPM

Tabel 3. 5 Capaian Pelaksanaan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	641	641	100	716.900.803	678.442.700	94,64	DAU + DAK Non Fisik
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	636	636	100	36.095.540	302.109.050	83,7	DAU + DAK Non Fisik
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	602	602	100	33.622.612	27.738.800	82,5	DAU
4	Pelayanan Kesehatan Balita	2.805	2.805	100	275.590.050	247.731.700	89,89	DAU + DAK Non Fisik
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	4.622	4.018	87	942.111.500	865.998.000	91,92	DAU + DAK Non Fisik
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.410	8.410	100	212.958.970	169.345.042	79,52	DAU + DAK Non Fisik
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	3.743	3.080	82	12.020.802	8.373.600	69,66	DAU
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.627	1.627	100	88.605.730	78.320.000	88,39	DAU
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	4.429	4.429	100	581.360.749	531.116.200	91,36	DAU + DAK Non Fisik
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.064	1.064	100	82.396.418	74.307.228	90,18	DAU
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	420	420	100	139.701.643	102.698.750	73,51	DAU + DAK Non Fisik
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	345	345	100	48.580.000	27.480.000	56,57	DAU

C. Alokasi Anggaran

Realisasi Anggaran SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Alokasi Anggaran SPM Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

NO	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	716.900.803	DAU + DAK Non Fisik
2	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	360.95.540	DAU + DAK Non Fisik
3	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	33.622.612	DAU
4	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Balita	275.590.050	DAU + DAK Non Fisik
5	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	942.111.500	DAU + DAK Non Fisik
6	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	212.958.970	DAU + DAK Non Fisik
7	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	12.020.802	DAU
8	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	88.605.730	DAU
9	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	581.360.749	DAU + DAK Non Fisik
10	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	82.396.418	DAU
11	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	139.701.643	DAU + DAK Non Fisik
12	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	48.580.000	DAU

D. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024

Tabel 3. 7 Rekapitulasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6
	Koto XI Tarusan	Puskesmas Barung-Barung Belantai	1	Medis	3
				Psikologis Klinis	0
				Keperawatan	13
				Kebidanan	25
				Kefarmasian	1
				Kesehatan Masyarakat	4
				Kesehatan Lingkungan	2
				Gizi	3
				Keterampilan Fisik	0
				Keteknisan Medis	5
				Keteknisan Biomedika	0
				Kesehatan Tradisional	0
		Puskesmas Tarusan	1	Medis	3
				Psikologis Klinis	0
				Keperawatan	15
				Kebidanan	30
				Kefarmasian	3
				Kesehatan Masyarakat	4
				Kesehatan Lingkungan	1
				Gizi	3
				Keterampilan Fisik	3
				Keteknisan Medis	5
				Keteknisan Biomedika	1
				Kesehatan Tradisional	0
	Bayang	Puskesmas Pasar Baru	1	Medis	3
				Psikologis Klinis	0
				Keperawatan	15
				Kebidanan	30
				Kefarmasian	2
				Kesehatan Masyarakat	4
				Kesehatan Lingkungan	4
				Gizi	2
				Keterampilan Fisik	1
				Keteknisan Medis	4
				Keteknisan Biomedika	0
				Kesehatan Tradisional	0
		Puskesmas Koto Perapak	1	Medis	4
				Psikologis Klinis	0
				Keperawatan	13
				Kebidanan	21
				Kefarmasian	4
				Kesehatan Masyarakat	4
				Kesehatan Lingkungan	2
				Gizi	2
				Keterampilan Fisik	1
				Keteknisan Medis	2
				Keteknisan Biomedika	0
				Kesehatan Tradisional	0

Bayang Utara	Puskesmas Asam Kumbang	1	Medis	4
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	12
			Kebidanan	23
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	3
			Kesehatan Lingkungan	2
			Gizi	2
			Keterampilan Fisik	1
			Keteknisan Medis	0
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0
IV Jurai	Puskesmas Salido	1	Medis	7
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	19
			Kebidanan	36
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	5
			Kesehatan Lingkungan	3
			Gizi	2
			Keterampilan Fisik	2
			Keteknisan Medis	6
			Keteknisan Biomedika	1
			Kesehatan Tradisional	0
	Puskesmas Lumbo	1	Medis	3
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	12
			Kebidanan	11
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	3
			Kesehatan Lingkungan	2
			Gizi	2
			Keterampilan Fisik	0
			Keteknisan Medis	3
			Keteknisan Biomedika	1
			Kesehatan Tradisional	0
Batang kapas	Puskesmas Pasar Kuok	1	Medis	4
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	11
			Kebidanan	15
			Kefarmasian	4
			Kesehatan Masyarakat	3
			Kesehatan Lingkungan	2
			Gizi	2
			Keterampilan Fisik	1
			Keteknisan Medis	1
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0
	Puskesmas IV Koto Mudik	1	Medis	4
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	15
			Kebidanan	28
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	4
			Kesehatan Lingkungan	0
			Gizi	2
			Keterampilan Fisik	1
			Keteknisan Medis	2
			Keteknisan Biomedika	1
			Kesehatan Tradisional	0

Sutera	Puskesmas Surantih	1	Medis	5
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	34
			Kebidanan	36
			Kefarmasian	4
			Kesehatan Masyarakat	5
			Kesehatan Lingkungan	1
			Gizi	2
			Keterapian Fisik	0
			Keteknisan Medis	7
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0
	Puskesmas Kayu Gadang		Medis	2
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	15
			Kebidanan	28
			Kefarmasian	3
			Kesehatan Masyarakat	1
			Kesehatan Lingkungan	0
			Gizi	0
			Keterapian Fisik	0
			Keteknisan Medis	3
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0
Lengayang	Puskesmas Kambang	1	Medis	4
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	17
			Kebidanan	26
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	9
			Kesehatan Lingkungan	1
			Gizi	3
			Keterapian Fisik	0
			Keteknisan Medis	7
			Keteknisan Biomedika	1
			Kesehatan Tradisional	0
	Puskesmas Koto Baru	1	Medis	4
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	25
			Kebidanan	40
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	5
			Kesehatan Lingkungan	0
			Gizi	2
			Keterapian Fisik	0
			Keteknisan Medis	1
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0
Ranah Pesisir	Puskesmas Balai Selasa	1	Medis	3
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	23
			Kebidanan	39
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	5
			Kesehatan Lingkungan	0
			Gizi	2
			Keterapian Fisik	0
			Keteknisan Medis	4
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0

Linggo Sari Baganti	Puskesmas Air Haji	1	Medis	3
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	16
			Kebidanan	41
			Kefarmasian	5
			Kesehatan Masyarakat	5
			Kesehatan Lingkungan	1
			Gizi	2
			Keterapian Fisik	1
			Keteknisan Medis	5
			Keteknisan Biomedika	1
			Kesehatan Tradisional	0
Airpura	Puskesmas Airpura	1	Medis	2
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	11
			Kebidanan	25
			Kefarmasian	3
			Kesehatan Masyarakat	3
			Kesehatan Lingkungan	2
			Gizi	3
			Keterapian Fisik	0
			Keteknisan Medis	2
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0
Inderapura	Puskesmas Inderapura	1	Medis	4
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	12
			Kebidanan	35
			Kefarmasian	5
			Kesehatan Masyarakat	4
			Kesehatan Lingkungan	2
			Gizi	3
			Keterapian Fisik	0
			Keteknisan Medis	2
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0
Ranah Ampek Hulu	Puskesmas Ranah Ampek Hulu	1	Medis	1
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	8
			Kebidanan	20
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	4
			Kesehatan Lingkungan	2
			Gizi	2
			Keterapian Fisik	0
			Keteknisan Medis	3
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0

Basa Ampek Balai	Puskesmas Tapan	1	Medis	4
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	12
			Kebidanan	19
			Kefarmasian	3
			Kesehatan Masyarakat	5
			Kesehatan Lingkungan	0
			Gizi	2
			Keterampilan Fisik	0
			Keteknisan Medis	4
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0
Lunang	Puskesmas Tanjung Beringin	1	Medis	2
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	14
			Kebidanan	21
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	4
			Kesehatan Lingkungan	0
			Gizi	1
			Keterampilan Fisik	3
			Keteknisan Medis	3
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0
Silaut	Puskesmas Tanjung Makmur	1	Medis	2
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	15
			Kebidanan	21
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	4
			Kesehatan Lingkungan	0
			Gizi	2
			Keterampilan Fisik	1
			Keteknisan Medis	4
			Keteknisan Biomedika	1
			Kesehatan Tradisional	0

E. Hasil Capaian

Tabel 3. 8 Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024

	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR				CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	9	10	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	641	641	100	97.95%	Tuntas Utama	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	636	636	100	97.95%	Tuntas Utama	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	602	602	100	97.95%	Tuntas Utama	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	2.805	2.805	100	97.95%	Tuntas Utama	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	4.622	4.018	87	97.95%	Tuntas Utama	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.410	8.410	100	97.95%	Tuntas Utama	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	3.743	3.080	82	97.95%	Tuntas Utama	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.627	1.627	100	97.95%	Tuntas Utama	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.429	4.429	100	97.95%	Tuntas Utama	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.064	1.064	100	97.95%	Tuntas Utama	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	420	420	100	97.95%	Tuntas Utama	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	345	345	100	97.95%	Tuntas Utama	

F. Permasalahan dan Solusi

F.1 Permasalahan

Dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 memiliki beberapa kendala, diantaranya :

1. Perhitungan kebutuhan SDM masih berdasarkan rasio jumlah tenaga dan jumlah penduduk secara umum tidak berdasarkan jumlah penduduk yang kemungkinan terpapar dan mempertimbangkan jenis pelayanan yang diberikan.
2. Penginputan pada aplikasi *e*-SPM Kementerian Bangda pada evaluasi SPM Kabupaten/ Kota masih belum tepat waktu dikarenakan keterlambatan pengumpulan data dari pengelola program.
3. Sistem pencatatan dan pelaporan capaian indikator SPM di Puskesmas sebagian masih dilaksanakan secara manual sehingga proses pengumpulan data dan pengisian laporan online yang ditetapkan oleh Kemendagri pengisiannya belum lengkap.
4. Sasaran dinas kesehatan masih menggunakan pusat data dan informasi (Pusdatin) kemenkes, dimana jumlah penduduk data tersebut lebih tinggi dari jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan.

F.2 Solusi

Solusi yang dapat dilakukan upaya mengatasi hambatan diatas diantaranya harus ada data real penduduk miskin untuk target capaian SPM yang di tanda tangani oleh kepala daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 2024

NO	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	716.900.803	DAU + DAK Non Fisik
2	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	360.95.540	DAU + DAK Non Fisik
3	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	33.622.612	DAU
4	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Balita	275.590.050	DAU + DAK Non Fisik
5	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	942.111.500	DAU + DAK Non Fisik
6	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	212.958.970	DAU + DAK Non Fisik
7	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	12.020.802	DAU
8	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	88.605.730	DAU
9	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	581.360.749	DAU + DAK Non Fisik
10	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	82.396.418	DAU
11	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	139.701.643	DAU + DAK Non Fisik
12	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	48.580.000	DAU

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaan yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, perhitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu syarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

B. Saran

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan urusan wajib daerah di Bidang Kesehatan. Saran yang dapat dilakukan upaya mengatasi hambatan diatas diantaranya harus ada data real penduduk miskin untuk target capaian SPM yang di tanda tangani oleh kepala daerah.